

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta
- Aspinall, E & Sukmajati, M. (2015), *Politik Uang Di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Polgov.
- Bawaslu, R.,I. (2018), *Tausiyah Pemilu Berkah, Serial Buku Pengawasan Partisipatif Bagian Sosialisasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu*, Jakarta, Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu.
- Budiardjo, M. (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (1994), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi kedua)*, Jakarta, Balai Pustaka
- Fahmi, K. (2012), *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Gani, A.,B.,D. (2003), *Hukum Suap dan Hadiah*, Jakarta, Pustaka Azzam.
- Hady, N. (2016), *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, Malang: Setara Press.
- Handayani, I.,T. (2014), *Tinjauan yuridis terhadap kampanye pemilihan umum kepala daerah dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye*, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Handoyo, B.,H.,C. (2009), *Hukum Tata Negara Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Ibrahim, J. (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Publishing.
- IDEA, I. (2002), *International Electrical Standards, Guidelines For Reviewing The Legal Framework Of Election*, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Ismawan. (1999), *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta, Media Pressindo.
- Kansil, C. (2003), *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Lamintang,P.,A.,F & Lamintang, F.,T. (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Marchewka, J.T, (2016), *Information Technology Project Management, Providing Measure Organizational Value*.
- Martosoewigno, S.,S. (1989), *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Marwan M., & Jimmy P, (2009), *Kamus Hukum*, Yogyakarta, Gama Press.
- Marzuki, P.M. (2013), *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Group.

- Mashad, D. (1998), Reformasi Sistem Pemilu Dan Peran Sospol, Jakarta, Gramedia Widyaswara.
- MD, Mahfud. (2012), Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers.
- Muhadam, L. (2007), Memahami Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Kelapa Gading Permai.
- Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nirwana, N. (2021), Praktik Money Politics Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros (Studi Kasus di Bawaslu Maros), Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Nugroho, H. (2001), Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Pahlevi, I. (2015), Sistem Pemilu Di Indonesia: Antara Proporsional dan Majoritarian, P3DI DPR & Azza Grafika.
- Puspaningrum, Rubiyanto, Mahmudi, M. & Taryono. (2019), Jejak Pengawasan Catatan Pengawas Pemilu 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali, Boyolali: Kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali Jl. Garuda No. 1 Banaran Boyolali,
- Rianda. (2021), Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Padang, Universitas Eka Sakti.
- Santoso, T & Budiati, I. (2019), Pemilu di Indonesia, Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan, Jakarta, Sinar Grafika
- Santoso, T. (2006), , Tindak Pidana Pemilu, Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, T. (2007), Hukum dan Proses Demokrasi, Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada, Jakarta, Kemitraan Partnership.
- Santoso, T. (2011), Problem dan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu, Jurnal Pemilu dan Demokrasi
- Santoso, Y. (2019), Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif , Jember: Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Sardini, N., H. (2011), Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Siregar,E,.F. (2020), Dimensi Pelanggaran Pemilu, Jakarta, Penerbit Konpress.
- Sodikin, (2014), Sodikin, 2014, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan. Bekasi: Gramata Publishing.
- Soekamto, S., & Mamudji, S. (1990), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019), Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi R&D dan Penelitian Pendidikan, Bandung, Alfabeta
- Sumartini, L. (2004), Money Politics Dalam Pemilu, Jakarta, Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia.

Surbakti, R. (2011), *Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta, Jakarta PGR.

Umam, A., K. (2006), *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail.

Umar, H. (2013), *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta, Rajawali Pers

Wiratha, I., M. (2006), *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta, CV Andi Offset.

Wiyanto. R. (2014), *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD dan DPRD*, Bandung, CV Mandar Maju.

Jurnal

Djalil, M.,A. (2014), *Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding*.

Fariha, N.A, Husen L.O & kama A.Z. (2021). *Efektifitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis*. *Journal Of Lex Generalis*.

Fitriani L.U, Karyadi L.W & Chaniago D.S. (2019), *Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*, *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*,

Hariman, S. (2019), *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*, *Jurnal Anti Korupsi*,

Irawan, D. (2015), *Politik Uang (Politik Uang) Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan)*, *Ejournal Ilmu Pemerintah*.

Izza, M.,Y. (2021), *Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019: Analisis Prosedural dan Substansial*, *Paradigma Polistaat, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.

Karna, A. M. I., & Suardana, I.W. (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Politik Uang Dalam Kampanye Pemilu*. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.

Muhtadi, B. (2019). *Politik uang dan new normal dalam pemilu pasca-orde baru*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*

Pardede, M. (2014). *Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia*. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.

Pujiyana & Harsan.,P. (2019), *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2019 di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta*, *Jurnal Ilmu Politik*.

Qodir, Z. (2016). *Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*.

Sutriyono, D. (2009), *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang*.

Suryani & Widiati., F. (2020), Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada, Jurnal Interpretasi Hukum.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Bawaslu Tahun No 7 Tahun 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Website

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Politik Uang, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3520539/mui-politik-uang-dan-pemberian-imbalan-hukumnyaharam>.

Abu Isma'il al-Atsari, almanhaj dari <https://almanhaj.or.id/7004-suap-mengundang-laknat.html>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 26 Januari 2023: Sistem Proporsional Terbuka Bebaskan Pemilih Memilih Wakil Legislatif, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18859&menu=2>,

jateng.bawaslu.go.id, Kamis, 18 April 2019: Bawaslu di Jateng Usut 27 Kasus Dugaan Politik Uang, dalam <https://jateng.bawaslu.go.id/2019/04/18/bawaslu-di-jateng-usut-27-kasus-dugaan-politik-uang/>

news.detik.com, Jumat, 25 Januari 2019, 16.43 WIB: Caleg PKS Boyolali Terpidana Politik Uang Masuk Bui Hari Ini, dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4400598/caleg-pks-boyolali-terpidana-politik-uang-masuk-bui-hari-ini>.